

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Fenomena permasalahan penyandang disabilitas di masyarakat bukanlah sesuatu yang baru di era modern ini. Permasalahan ini sudah ada sejak dahulu kala dan telah menjadi pergumulan semua negara di dunia ini. Keberadaan penyandang disabilitas di dalam masyarakat telah menjadi kelompok minoritas terbesar di dunia meliputi 600 juta orang, di mana dua per tiga dari keseluruhannya berada di negara berkembang.¹ Penyebab seseorang menyandang disabilitas di antaranya bawaan sejak lahir, akibat kecelakaan, korban kriminalitas, bencana alam, atau pun karena menderita penyakit.

Upaya penyelesaian permasalahan hidup penyandang disabilitas terus mengalami perkembangan. Upaya tersebut diawali dari perubahan istilah cacat menjadi disabilitas disertai pergeseran paradigma mengenai disabilitas, penanganan dalam berbagai bentuk pelayanan, dibentuknya berbagai forum khusus untuk membahas pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, dan dikeluarkan peraturan pemerintah berupa pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.² Khususnya di Indonesia, secara hukum pemerintahan telah membuat

1. Meilanny Budiarti Santoso dan Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas," *Journal of International Studies*, vol. 1 no. 2 (Mei 2017): 167.

2. Di dalam berbagai instrumen internasional khususnya pada konferensi WINA (*World Instant Noodles Association*) tanggal 14-25 Juni 1993 telah mengesahkan pranata perlakuan khusus atau perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas dalam mengakses fungsi fungsi pelayanan

Undang-Undang Dasar perihal penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka bebas dari kesenjangan sosial dan ekonomi.³ Berbagai wujud nyatanya yakni disediakan aksesibilitas di sebagian tempat, pelatihan dan pendidikan inklusif di beberapa tempat, serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Upaya tersebut diselenggarakan karena munculnya kesadaran bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara Indonesia yang layak memperoleh hak perlindungan dan kesejahteraan, tetapi selama ini hidup sebagai masyarakat yang terpinggirkan dengan taraf kehidupan yang rendah.

Kendati demikian, pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dirasa kurang komprehensif. Secara umum, penyandang disabilitas masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan status masyarakat yang terpinggirkan dan lemah.⁴ Hidup sebagai masyarakat yang rentan terhadap kriminalisasi baik verbal maupun non verbal. Hidup sebagai masyarakat yang mengalami keterbelakangan di dalam berbagai aspek kehidupan.⁵ Buktinya dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang masih dialami penyandang disabilitas, di antaranya aksesibilitas yang tidak

publik. Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komnas HAM, 2011), 11.

3. Di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia no. 19 tahun 2011 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Susilo Bambang Yudhoyono, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011: Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas*," <http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf> (diakses 05 Oktober 2017).

4. Komnas HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Komnas HAM, 2011), 17.

5. HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, 17.

memadai, kesempatan kerja yang terbatas, akses pendidikan atau kesehatan yang sulit, dan berbagai hal lainnya. Misalnya, penyandang disabilitas lebih sulit menemukan lapangan pekerjaan dari pada masyarakat biasa. Belum banyak lapangan pekerjaan, khusus disediakan bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas mengalami kesulitan di dalam meningkatkan taraf kehidupannya.

Kesulitan penyandang disabilitas di dalam meningkatkan taraf kehidupannya disebabkan karena masyarakat menilai penyandang disabilitas sebagai individu yang terbatas, tidak produktif, dan tidak mampu melakukan berbagai pekerjaan yang menuntut tanggungjawab. Tolok ukur pemerintah dan masyarakat adalah kesempurnaan tubuh di dalam bekerja. Dampaknya, ruang gerak penyandang disabilitas terbatas di dalam melakukan kegiatan yang menuntut tanggungjawab seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan berbagai kegiatan lainnya.⁶ Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat melupakan bahwa kesempurnaan tubuh bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam melihat kompetensi seseorang dalam dunia kerja. Seorang perempuan tunarungu berhasil bekerja di beberapa perusahaan dan menghadapi kompetisi yang keras di dunia kerja.⁷ Menurutnya, bukan hanya dirinya yang mampu bekerja, tetapi para penyandang tunarungu lainnya juga bisa menghadapi kompetisi di dunia kerja.⁸

6. HAM, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, 105.

7. Kompas.com, "Menjadi Perempuan Tuna Rungu Tanpa Batas," <http://internasional.kompas.com/read/2011/12/21/14085991/Menjadi.Perempuan.Tunarugu.Tanpa.Batas> (diakses 15 Oktober 2017).

8. Kompas.com, "Menjadi Perempuan Tuna Rungu Tanpa Batas," (diakses 15 Oktober 2017).

Selain itu, salah satu permasalahan terbesar penyandang disabilitas di dalam masyarakat adalah paradigma dan sikap yang tidak ramah yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap keberadaan mereka. Sikap masyarakat dinilai berkonotasi destruktif dan sama sekali tidak ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Sikap masyarakat terkesan merendahkan, meragukan, bahkan mengabaikan kemampuan yang ada di dalam diri penyandang disabilitas. Bentuknya berupa pembatasan hak selaku warga negara terlihat dari tindakan diskriminasi, marginalisasi, *stereotype* sosial, dan penolakan di dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai pribadi yang bergantung kepada orang lain, tidak mandiri, lemah, merepotkan orang lain, pribadi yang tidak utuh dengan berbagai *stereotype*, dan perlakuan negatif lainnya dari masyarakat. Mereka diperhitungkan sebagai manusia yang hidup dengan santunan amal dan belas kasihan orang lain.

Seharusnya, masyarakat perlu memberikan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Menurut penulis, dukungan sosial dapat diwujudkan di dalam tiga bentuk. *Pertama*, pengakuan dari pemerintah dan masyarakat bahwa mereka layak diperlakukan sama dengan masyarakat biasa, patut dihormati, dan diberi kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. *Kedua*, cara pandang yang sehat dan sikap positif berkaitan dengan diri penyandang disabilitas. *Ketiga*, memperjuangkan martabat dan hak penyandang disabilitas supaya pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian kepada penyandang disabilitas.

Jika kita mengamati kondisi di dalam gereja, sikap destruktif berupa nilai-nilai yang keliru yang dibangun oleh masyarakat juga terlihat di dalam komunitas gereja. Salah satunya, penyandang disabilitas dipandang sebagai objek penerima pelayanan diakonia. Mereka hanya sekadar objek pelayanan (jemaat pasif), bukan subjek di dalam komunitas tubuh Kristus. Secara tidak langsung, tindakan ini menunjukkan gereja memandang mereka sebagai jemaat yang tidak produktif, yang tidak mampu memberikan kontribusi di dalam komunitas gereja. Di dalam hal ini, gereja harus mengingat bahwa nilai hidup seseorang tidak terletak dalam produktivitasnya, melainkan identitas dirinya sebagai ciptaan Allah yang berharga.

Hery Susanto mengutarakan bahwa di dalam Kekristenan, penyandang disabilitas sering sekali dipandang sebagai “masalah” yang harus diperbaiki, atau beban yang harus ditanggung dengan tidak melihat mereka sebagai manusia yang memiliki gambar Allah.⁹ Isabella Novsima Sinulingga mengklaim bahwa gereja cenderung memperlakukan mereka sebagai pribadi yang tidak sempurna, tidak berdaya, bahkan berdosa sehingga mereka dipinggirkan dan diisolasi.¹⁰ Salah satu isi dokumen pada pertemuan konferensi *World Council of Churches* adalah pernyataan bahwa penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan yang tidak adil di dalam gereja dan dipandang sebagai seseorang yang tidak mampu menjalani

9. Hery Susanto, “Disability Ministry: Sebagai Sebuah Jendela Pelayanan yang Termarginalisasi dalam Pelayanan Gereja,” <https://sttjki.wordpress.com/2016/01/20/Disability-Ministry-Sebagai-Sebuah-Jendela-Pelayanan-Yang-Termarginalisasi-Dalam-Pelayanan-Gereja/> (diakses 12 Oktober 2017).

10. Isabella Novsima Sinulingga. “Disabilitas atau Difabilitas: Telaah Isu Retardasi Mental dalam Perspektif Teologi Kristen tentang Manusia (Skripsi S,T, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2002), 4.

kehidupan sepenuhnya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang keliru di dalam komunitas gereja di dalam melihat dan menyikapi keberadaan penyandang disabilitas.

Secara singkat penulis memberikan tiga contoh konkret. *Pertama*, aksesibilitas di gereja tidak memadai bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, khotbah tidak didesain khusus untuk menjawab kebutuhan penyandang disabilitas (gereja tidak menyuarakan kabar baik atau pesan harapan kepada penyandang disabilitas melalui khotbah).¹² *Ketiga*, tidak disediakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas oleh gereja.

Seharusnya, gereja berperan menjadi wadah kasih, penerimaan, dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Jika ketidakadilan dan rasa belas kasihan menjadi pengalaman sehari-hari penyandang disabilitas di dalam masyarakat, gereja tampil sebagai *healing community* bagi penyandang disabilitas dari luka dan trauma mereka. Namun, jika kasih, penerimaan, dan keadilan tidak ditemukan di dalam komunitas gereja, komunitas gereja dianggap sebagai komunitas gereja yang tidak bersahabat, tidak memiliki kasih, tidak menghargai sesama, dan tidak melaksanakan Amanat Agung Allah.

11. World Council of Churches. "The Gift of Being Revised: Called to Be a Church of All and for All" (makalah ini dipresentasikan pada konferensi World Council of Churches, Trodheim, Norway, 22-28 Juni 2016).

12. Tabita Kartika Christiani, Robert Setio, dan Masriany Sihite, *Disability Discourse for Theological Institution in Indonesia* (Yogyakarta: Duta Wacana, 2011), 100. Misalnya gereja menyesuaikan khotbah dengan jemaat biasa yang memiliki aktivitas kerja rutin dan hal tersebut tidak relevan bagi sebagian besar penyandang disabilitas sebab kebanyakan dari mereka bukan seorang pekerja.

Menurut penulis, jika komunitas gereja menolak keberadaan penyandang disabilitas, komunitas gereja dikategorikan menjadi komunitas gereja yang tidak sehat. Karena permasalahan disabilitas dipengaruhi oleh teologi yang dibangun di dalam gereja. Keberadaan penyandang disabilitas bukan hanya tentang “kecacatan” tetapi juga berkaitan dengan pemahaman gereja tentang tubuh Kristus, gambar dan rupa Allah, keadilan Allah, kedaulatan Allah, misi Allah, dan kasih Allah bagi manusia.

Pada akhirnya, penulis menyimpulkan pembahasan tentang disabilitas dapat bermanfaat. Tujuannya untuk mengenal keberadaan penyandang disabilitas, mengenal statusnya di dalam relasinya dengan Allah, diri sendiri, sesama dan menjadi pendorong bagi komunitas gereja untuk menyikapi dan mengetahui cara hidup yang benar dengan penyandang disabilitas sesuai dengan terang kebenaran Alkitab.

Pokok Permasalahan

1. Pemahaman yang tepat tentang keberadaan penyandang disabilitas belum secara serius diperhatikan oleh gereja.
2. Komunitas gereja memperlakukan penyandang disabilitas secara serius memiliki pemahaman teologis berkaitan dengan disabilitas.
3. Komunitas gereja tidak mengetahui strategi hidup bersama penyandang disabilitas sebagai sesama anggota tubuh Kristus.

Tujuan Penulisan

1. Memberikan pemahaman yang multidimensi tentang keberadaan penyandang disabilitas dalam kaitan dengan dirinya dan relasi sosialnya.
2. Menjelaskan pemahaman teologis tentang disabilitas di dalam terang kebenaran Alkitab dan keberadaan gereja di dalam peran dan hakikatnya sebagai tubuh Kristus.
3. Menjelaskan strategi hidup bersama penyandang disabilitas sebagai sesama anggota tubuh Kristus.

Pembatasan Penulisan

Beberapa batasan di dalam penulisan skripsi ini. *Pertama*, skripsi ini tidak sedang berusaha membahas teologi disabilitas.¹³ *Kedua*, spektrum yang penulis bahas yaitu penyandang disabilitas fisik. *Ketiga*, skripsi ini ditujukan bagi gereja yang memiliki jemaat penyandang disabilitas fisik. Skripsi ini membahas peran gereja di dalam menjalankan fungsinya sebagai sesama anggota tubuh Kristus di dalam merangkul penyandang disabilitas melalui konsep “hidup bersama.”.

Intensinya, gereja memahami keberadaan dan tinjauan teologis tentang penyandang

13. Teologi disabilitas diperkenalkan oleh Nancy L. Eisland (penyandang disabilitas). Teologi disabilitas dibangun berdasarkan refleksi teologi terhadap pengalaman nyata para penyandang disabilitas. Eisland mengupayakan penafsiran tentang “*the disabled God*” dengan mengangkat teks-teks Alkitab. Salah satunya, dia menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus menyandang disabilitas terlihat dari bekas luka di kedua tangan dan kakinya (Lukas 24:36-39). Nancy L. Eisland, *The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability* (Nashville: Abingdon Press, 1994), 99-100.

disabilitas serta mampu melihat dirinya di dalam terang kebenaran Alkitab sehingga mampu mendefinisikan dan memperlakukan penyandang disabilitas dengan tepat.

Metodologi Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan landasan teoritis berdasarkan riset kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber literatur, buku-buku tentang disabilitas, ensiklopedia, jurnal, situs internet, dan sumber sah lainnya yang menjadi dasar penelitian.

Sistematika Penulisan

Pembahasan di dalam penulisan skripsi ini disusun di dalam lima bab. Bab satu membahas tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab dua, akan menjelaskan pemahaman komprehensif tentang keberadaan penyandang disabilitas di dalam kaitan dengan dirinya dan relasi sosialnya. Bab tiga, akan menjelaskan disabilitas dan gereja di dalam kajian teologis. Bab empat, akan menjelaskan strategi hidup bersama penyandang disabilitas sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bab lima menjadi bagian akhir penulisan skripsi ini, berupa kesimpulan dan refleksi penulis terhadap seluruh isi dari skripsi ini.